

**THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL  
GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM AND EMPLOYEE  
PERFORMANCE ON THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL FINANCIAL  
MANAGEMENT IN THE REGIONAL FINANCIAL AND REVENUE  
MANAGEMENT AGENCY OF JAMBI PROVINCE**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH  
DAERAH DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**Galang Dimas Prayogo<sup>1)</sup>\***  
**Syamsurijal Tan<sup>2)</sup>**  
**Zainul Bahri<sup>3)</sup>**

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2)&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

\*) Korespondensi

Email: galangdimasprayogo9@gmail.com<sup>1)</sup>, syamsurijaltan@unja.ac.id<sup>2)</sup>, zainulbahri@unja.ac.id<sup>3)</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the impact of SIPD implementation and employee performance on the regional financial management process, as well as to identify and analyze the strategies implemented by the Jambi Province Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) to improve the effectiveness of SIPD in regional financial management. The population of this study was all employees at the Jambi Province Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) involved in the use of SIPD. The total sample size was 60 respondents, using a saturated sampling technique, comprising agency heads, division heads, sub-division heads, and staff. Data analysis was performed using multiple linear regression with the help of SPSS version 20 and a SWOT analysis. The results indicate that the implementation of a regional government information system and employee performance have a positive effect on the effectiveness of regional financial management. Meanwhile, the strategies generated by the SWOT analysis indicate leveraging strengths to seize opportunities, and leveraging strengths to capitalize on opportunities.*

**Keywords:** *Implementation of local government information systems, Employee performance and strategy*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi SIPD dan pengaruh kinerja pegawai terhadap proses pengelolaan keuangan daerah serta mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan BPKPD Provinsi Jambi untuk meningkatkan efektifitas SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Provinsi Jambi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah provinsi jambi yang terlibat dalam penggunaan SIPD. Total sampel penelitian ini adalah 60 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh yang menempati posisi kepala badan, kepala bidang, kepala sub bidang dan staf. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS versi 20 dan analisis Swot. Hasil menunjukkan bahwa Penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan kinerja pegawai berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Strategi yang dihasilkan oleh analisis SWOT menunjukkan memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang, mengambil kekuatan dengan memanfaatkan peluang.

**Kata kunci:** Penerapan sistem informasi pemerintah daerah, Kinerja pegawai dan Strategi



## 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada bagaimana cara daerah tersebut mengelola keuangannya. Berdasarkan aturan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diterangkan bahwa keuangan daerah meliputi semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah, baik berupa uang maupun aset lainnya. Sumber daya ini digunakan untuk menjalankan kewajiban daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, diperlukan sistem yang jelas, terorganisir, dan terukur. Setiap langkah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengadopsi dari tata kelola yang baik adalah keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan masyarakat dan keadilan. Dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam setiap proses, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih proaktif dalam pembangunan daerah (Defitri, 2018).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan, SIPD merupakan suatu sistem informasi yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah. SIPD ini berfungsi untuk mengelola dan menyajikan berbagai data penting seperti data pembangunan, keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan., Kota Jambi, Jambi 36122. Merupakan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pendapatan Provinsi Jambi. Tugas ini meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan kas, pencatatan keuangan, dan pembuatan laporan keuangan.

**Tabel 1. Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

No	Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Jabatan
1	Kepala Badan (kaban) Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran (PA)
2	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4	Kepala Bidang Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sumber: <https://bakeuda.jambiprov.go.id/dokumen/kategori/7>

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat penting bagi pegawai yang mengelola anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan daerah secara lebih efisien dan transparan. Selain mempermudah

pekerjaan administratif, SIPD memberikan data terkini yang sangat berguna bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan penting. Hal ini mendukung upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seringkali menjadi sorotan, meskipun seharusnya mereka bekerja dengan optimal. Hal ini tercermin dari berbagai aspek, seperti kuantitas dan kualitas kerja, efisiensi waktu, kolaborasi, dan kehadiran. Masalah kualitas dan kuantitas kerja muncul karena sebagian pegawai belum sepenuhnya menguasai tugas mereka, yang berakibat pada pekerjaan yang tidak efektif dan efisien. Sementara itu, masalah efisiensi waktu disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar waktu yang berlaku, serta adanya pandangan bahwa faktor waktu kurang penting dalam pekerjaan pemerintah.

Studi yang dilakukan oleh Nasution (2021) menyimpulkan bahwa kendala dalam pengembangan perangkat lunak SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan faktor utama yang menyebabkan berbagai masalah operasional, seperti error sistem, ketidaksesuaian data, dan kurangnya koordinasi antar pengguna. Akibatnya, kualitas data yang dihasilkan menjadi diragukan dan laporan yang dihasilkan pun tidak konsisten. Kondisi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan berakibat pada inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain masalah yang sudah disebutkan, SIPD juga mengalami kendala dalam mengelola anggaran, seperti penundaan pergeseran anggaran dan hambatan dalam sistem penggajian.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak jelas bahwa diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap potensi dan tantangan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara penerapan SIPD dan kinerja BPKPD Provinsi Jambi dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Fokus utama penelitian ini adalah pada tiga aspek penting, yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi data, dan penyusunan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu proses sistematis yang melibatkan perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah kini difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan penuh masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup perencanaan dan pengawasan, adalah kunci untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Untuk mencapai hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan (Pratommi et al., 2023).

### **2.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 menetapkan bahwa SIPD harus mencakup tiga jenis informasi utama, yaitu:

- a. Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Informasi Keuangan Daerah; dan
- c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Dengan memanfaatkan SIPD, pemerintah daerah dapat mengurangi alokasi anggaran untuk membangun sistem informasi yang terpisah-pisah. SIPD mengintegrasikan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan dalam satu platform, sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dapat ditingkatkan (Maurits, 2023). SIPD dirancang untuk menghilangkan duplikasi dalam proses penganggaran, sehingga mencegah pemborosan anggaran. Selain itu, sistem ini juga menyelaraskan proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah, sehingga mempermudah pengawasan dan audit, serta meningkatkan akuntabilitas (Fatoni, 2022).

### 2.3 Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh gabungan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi di dalam organisasi, kondisi di luar organisasi, dan faktor-faktor yang ada dalam diri pegawai itu sendiri (Junaidi, 2021). Faktor tersebut antara lain:

#### (1) Faktor internal pegawai

yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. Faktor-faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang diperoleh, misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi kerja. Setelah dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi dan

#### (2) Faktor-faktor lingkungan internal organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat memengaruhi tinggi rendahnya pegawai. Sebaliknya, jika sistem kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk, kinerja karyawan akan menurun. Faktor internal organisasi lainnya misalnya strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan kompensasi. Oleh karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan meningkatkan produktivitas karyawan.

#### (3) Faktor lingkungan eksternal organisasi.

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja karyawan.

### 2.4 Teori Efektivitas

Konsep efektivitas lembaga merujuk pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Secara keseluruhan, efektivitas dapat diuraikan dalam empat aspek menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dengan tepat, sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Mencapai keunggulan kompetitif, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik.
- c. Menghasilkan hasil yang bernilai, memberikan manfaat bagi organisasi atau individu.
- d. Beradaptasi dengan perubahan, mampu menghadapi tantangan dan peluang dimasa depan.

Steers menyampaikan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan Martoyo mendefinisikan sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

### 2.5 Strategi

Menurut Henry Mintzberg (1998) strategi memiliki beragam dimensi, mulai dari perencanaan yang terstruktur hingga perspektif menyeluruh tentang suatu situasi. Strategi dapat diartikan sebagai rencana, pola, posisi, taktik, atau cara pandang. Menurut Siagian (2004) strategi merupakan kumpulan keputusan penting yang diambil oleh pimpinan tertinggi perusahaan untuk mengarahkan perusahaan mencapai tujuannya, dan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan keputusan tersebut. Pandangan Siagian lebih banyak tertuju pada dunia bisnis.

## 2.6 Hipotesis

Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, hipotesis adalah proposisi sementara yang diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, dan validitasnya bergantung pada hasil pengujian empiris terhadap data yang relevan. (Mulyani, 2021). Adapun untuk penelitian ini peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

- Hipotesis umum: Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- H1 : Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
- H2 : Kinerja Pegawai meningkatkan efektivitas dalam pelaporan keuangan daerah di Provinsi Jambi

## 3. METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey, penelitian ini akan mengadopsi kuesioner menggunakan skala likert sebagai alat pengumpulan data. Menggunakan teknik sampel jenuh sebagai teknik pengambilan sampel dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang meliputi pegawai yang terlibat dalam penggunaan SIPD. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan spss versi 20 dan analisis swot. Melakukan uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reabilitas dan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas serta uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan (F), uji statistic (t) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dan analisis swot menggunakan perhitungan IFAS dan EFAS untuk menentukan kuadran pada analisis swot

## 4. HASIL

### 4.1 Uji Kualitas Data

#### 4.1.1 Uji Validitas

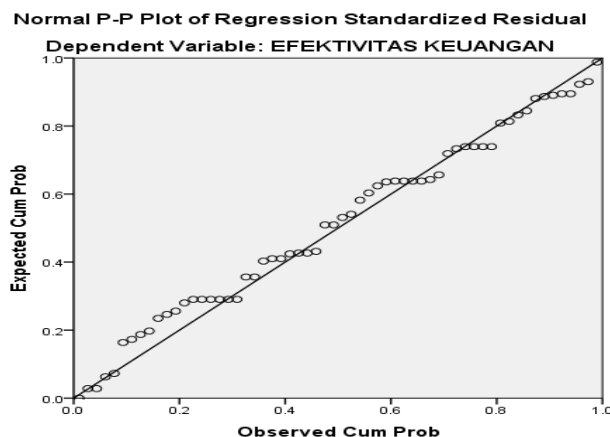
- hasil uji validitas pada variabel penerapan sistem informasi pemerintah daerah ( $X_1$ ), kinerja pegawai ( $X_2$ ), strategi ( $X_3$ ) dan pengelolaan keuangan daerah (Y), dapat diketahui bahwa r hitung dari semua item pernyataan lebih besar dari r tabel, maka semua item yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

#### 4.1.2 Uji Reabilitas

- Diketahui nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) pada variabel  $X_1$  sebesar 0,757, variabel  $X_2$  sebesar 0,860, variabel  $X_3$  sebesar 0,910 dan variabel efektivitas keuangan daerah (Y) sebesar 0,707. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliabel atau konsisten sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) pada  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan Y tersebut lebih besar dari 0,60.

### 4.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.1 Uji Normalitas

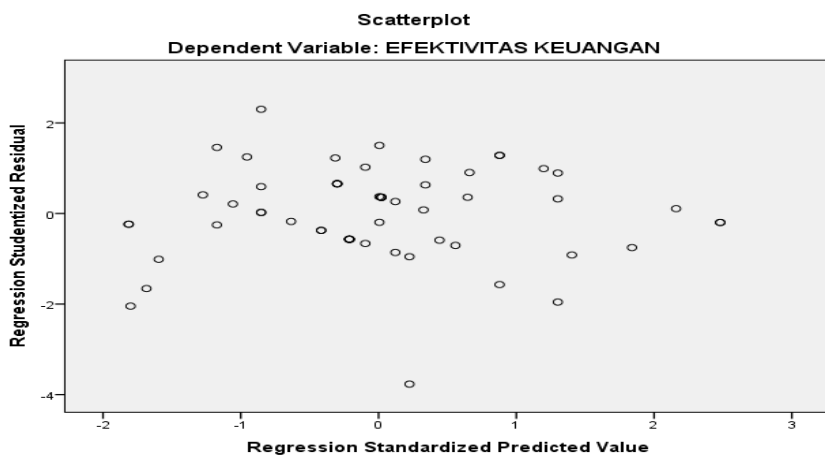


terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria normalitas.

#### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

diketahui nilai *tolerance* untuk penerapan SIPD adalah  $0,931 > 0,1$  , untuk KP adalah  $0,931 > 0,1$ . Sementara nilai VIF untuk variabel untuk penerapan SIPD ( $X_1$ ) adalah  $1.074 < 10$ . , untuk kinerja pegawai ( $X_2$ ) adalah  $1.074 < 10$ . Maka, mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam model regresi.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas



Pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0, tidak berkumpul di atas dan di bawah saja dan tidak membentuk pola tertentu. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian.

#### 4.3 Uji Hipotesis

### 4.3.1 Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	153.436	2	76.718	23.779	.000 <sup>b</sup>
Residual	183.897	57	3.226		
Total	337.333	59			

Dapat diketahui bahwa nilai f hitung variabel SIPD dan KP adalah sebesar  $23.779 > f$  tabel 2,38 Selanjutnya berdasarkan nilai signifikansi, diketahui nilai signifikansi variabel SIPD dan KP sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen penerapan SIPD dan kinerja pegawai secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu efektivitas keuangan sehingga  $H_0$  diterima.

### 4.3.2 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.625	3.002		1.207	.232
1 SIPD	.517	.096	.548	5.402	.000
2 KP	.352	.130	.275	2.715	.009

- t hitung yang diperoleh untuk variabel penerapan SIPD adalah sebesar 5,402 dengan nilai t tabel sebesar 2,000. Diketahui bahwa  $t$  hitung  $5,402 > t$  tabel 2,000 yang menggambarkan penerapan SIPD memiliki pengaruh terhadap efektivitas keuangan daerah. Adapun nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  yang mengindikasikan bahwa penerapan SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas keuangan daerah.
- nilai t hitung variabel kinerja pegawai adalah 2,715 dengan nilai t tabel 2,000. Diketahui bahwa  $t$  hitung  $2,715 > t$  tabel 2,000 yang memperlihatkan kinerja pegawai berpengaruh terhadap efektivitas keuangan. Adapun nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$  yang berarti kinerja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas keuangan. Sehingga dapat disimpulkan kinerja pegawai berpengaruh terhadap efektivitas keuangan daerah.

### 4.3.3 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 <sup>a</sup>	.455	.436	1.796

Hasil analisis variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan  $R^2$  sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel SIPD dan KP, terhadap efektivitas keuangan daerah adalah sebesar 45, 5%. Sedangkan sisanya 54, 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.625	3.002		1.207	0.232
1 SIPD	0.517	0.096	0.548	5.402	0.000
2 KP	0.352	0.130	0.275	2.715	0.009

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 3,625 + 0,517\text{SIPD} + 0,352\text{KP} + e \dots\dots\dots 3.3$$

(0.000)      (0.009)

Dimana :

$$F_{\text{test}} = 23,779$$

$$R^2 = 0,455$$

Dari hasil uji analisis di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koefisien konstanta bernilai sebesar 3,625. Koefisien konstanta yang bernilai positif ini mengindikasikan bahwa jika tidak terdapat penerapan SIPD dan kinerja pegawai maka efektivitas keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 3,625 atau dengan kata lain dapat diartikan nilai 3,625 merupakan nilai ketika variabel penerapan SIPD dan kinerja pegawai konstan.
- Koefisien regresi penerapan SIPD sebesar 0,517 yang berarti apabila penerapan SIPD mengalami kenaikan sebesar 1% maka efektivitas keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,517. Dan apabila penerapan SIPD mengalami penurunan sebesar 1% maka efektivitas keuangan akan menurun sebesar 0,517.
- Koefisien regresi kinerja pegawai sebesar 0,352 yang berarti apabila kinerja pegawai mengalami kenaikan 1% maka efektivitas keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,352. Dan jika kinerja pegawai mengalami penurunan 1% maka efektivitas keuangan daerah juga akan menurun sebesar 0,352.

#### 4.5 Analisis SWOT

No	Kekuatan (Strengths)	Bobot	Rating	Skor
1.	Sumber daya manusia kompeten dan terlatih Dukungan pimpinan yang kuat	0,20	4,0	0,80
2.	Infrastruktur memadai	0,10	3,0	0,30
3.		0,15	3,5	0,53
	Jumlah skor kekuatan	0,45		1,63

No	Kelemahan (Weaknesses)	Bobot	Rating	Skor
1.	Kurangnya pelatihan lanjutan	0,25	2,0	0,50
2.	Kendala teknis sistem (Bug)	0,18	1,5	0,27
3.	Kurangnya sosialisasi fitur – fitur yang ada	0.12	1,0	0,12

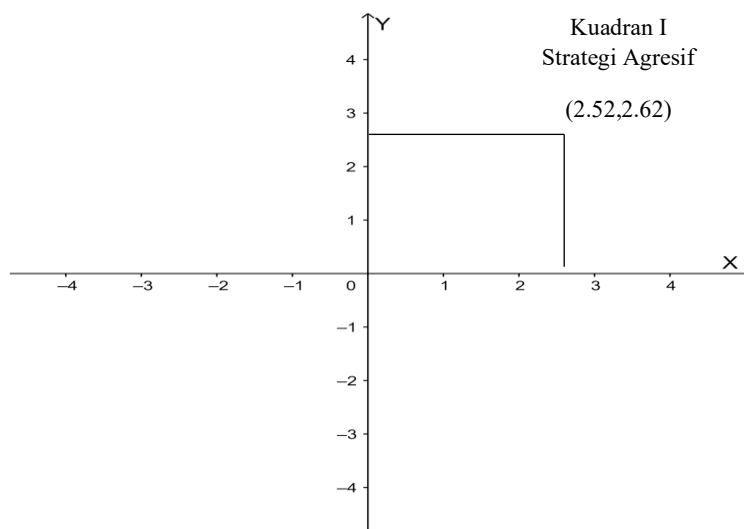
---

Jumlah skor kelemahan	0,55	0,89
Total Kekuatan + Kelemahan	1,00	2,52

---

Dari hasil perhitungan tabel IFAS dan EFAS didapatkan nilai IFAS sebesar 2.52 dan skor untuk hasil EFAS sebesar 2.62. Apabila dikonversikankedalam gambar Diagram IE Matriks, maka terletak di kuadran I, di mana hasilnya perusahaan masuk ke dalam fase mendukung strategi agresif.

**Gambar 1. Kuadran SWOT**



Dari hasil perhitungan kuadran SWOT terlihat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berada pada posisi kuadran I, yaitu faktor eksternal dan internal positif menunjukkan bahwa lingkungan usaha yang dihadapi BPKPD secara relatif berpeluang lebih besar dibandingkan ancaman dan kekuatan relatif lebih unggul dibandingkan dengan kelemahan.

## 5. PEMBAHASAN

### 5.1 Pengaruh Penerapan SIPD Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data statistika yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara parsial terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel SIPD dan efektivitas keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sehingga  $H_1$  diterima. Artinya semakin tinggi penerapan SIPD maka akan semakin tinggi tingkat efektivitas keuangan daerah, dan sebaliknya jika tingkat penerapan SIPD menurun maka tingkat efektivitas keuangan daerah juga akan mengalami penurunan. Steers menyampaikan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya” dan Efektivitas adalah suatu program dapat dinilai dari seberapa jauh program tersebut berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara keluaran program dengan hasil akhir yang dicapai (Pratommi et al., 2023).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joseph Eufriyanto Da Silva (2022) menunjukkan bahwa penerapan SIPD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap hasil Opini Audit BPK. Demikian pula, kualitas LKPD juga menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap hasil Opini Audit BPK. Secara keseluruhan, baik penerapan SIPD maupun kualitas LKPD secara bersama-sama

memberikan pengaruh terhadap hasil Opini Audit BPK. M. Wisnu Pratommi dan Isnawati (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas keuangan daerah.

## 5.2 Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data statistika yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara parsial terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja pegawai dan efektivitas pengelolaan keuangan pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah maka  $H_2$  diterima. Hal ini berarti bahwa apabila kinerja pegawai semakin baik maka tingkat pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kinerja pegawai yang dimiliki oleh para pegawai maka semakin rendah pula tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh gabungan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi di dalam organisasi, kondisi di luar organisasi, dan faktor-faktor yang ada dalam diri pegawai itu sendiri (Junaidi, 2021).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malasari Dewi, Nia Sumiati dan Warman Suryaman (2023) melakukan Penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cimahi”. Studi ini meneliti sejauh mana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memengaruhi performa para pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori dan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan SIPD, baik secara keseluruhan maupun sebagian, memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelola keuangan (Dewi et al., 2023).

## 5.3 Mengetahui Strategi Yang Dilakukan Dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

### a. Kekuatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa responden menilai kekuatan penerapan SIPD dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa :

- a) Menggunakan keahlian staf yang ada untuk mengadopsi dan mengintegrasikan fitur-fitur baru SIPD yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- b) Mengajukan proposal kepada pimpinan untuk penguatan sistem dan pengembangan fitur-fitur SIPD, didukung oleh kebijakan pemerintah pusat.
- c) Melakukan inovasi dalam sistem informasi yang ada, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

### b. Peluang

Analisis SWOT juga menunjukkan adanya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerapan SIPD.

- a) Potensi untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi dengan teknologi baru dan peningkatan fitur sistem.
- b) Dukungan dari pihak terkait, seperti manajemen dan lembaga pemerintah lainnya.
- c) Menginisiasi kerja sama lembaga lain untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan SIPD.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah adalah memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang (SO), menggunakan sistem yang terintegrasi untuk mendukung kebijakan digitalisasi pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan peluang.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian statistika dan pembahasan yang telah dilakukan terkait pengaruh penerapan SIPD, kinerja pegawai dan strategi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Penerapan SIPD dan kinerja pegawai berpengaruh positif serta signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, semakin baik penerapan SIPD dan kinerja pegawai, semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerapan SIPD. Strategi seperti peningkatan pelatihan, pengembangan sistem, serta pemanfaatan dukungan pemerintah pusat, kerja sama antar lembaga, dan kemajuan teknologi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas SIPD. Langkah ini akan mendorong pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien sehingga berdampak positif bagi pelayanan publik.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, disarankan agar pemerintah melakukan penguatan terhadap infrastruktur dan dukungan teknis dalam penggunaan sistem tersebut. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan data dari sistem informasi untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan kapasitas para pengguna agar mampu mengoperasikan sistem secara efektif. Selanjutnya, dalam aspek kinerja pegawai, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan kapasitas setiap pegawai melalui sistem manajemen kinerja yang efektif, penilaian kinerja yang objektif, serta pemberian penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang sangat baik.

Selain itu, dari sisi strategi organisasi, disarankan agar Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menerapkan perencanaan strategis berbasis analisis SWOT dengan implementasi serta monitoring yang efektif dan responsif terhadap dinamika lingkungan kerja. Penguatan keamanan data dan pelaksanaan audit secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga integritas dan akurasi data. Adapun bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji variabel-variabel yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap efektivitas tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dewi, M., Sumiati, N., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. *Professional: Jurnal*

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Galang Dimas Prayogo, Syamsurijal Tan, dan Zainul Bahri)

---

- Komunikasi Dan Administrasi Publik, 10(2), 4214–4219.  
<https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4500>
- Junaidi, J. (2021). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(4), 411–426.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i4.720>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Mintzberg, Henry, Bruce W. Ahlstrand & Joseph Lampel. 1998. *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. California: Free Press
- Mulyani, S. R. (2021). Metodologi Penelitian. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SYSTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUS\\_AT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI)
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pratommi, M. W., Muhsyaf, S. A., & Isnawati. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99–109. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>
- Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.